



IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PROSES BELAJAR PADA SEKOLAH DASAR NEGRI 41 BENGKULU SELATAN

Yunima Herti¹, Elfahmi Lubis², Septina Lisdayanti³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Bengkulu



***Corresponding author**

Email: yunimaherti7@gmail.com

HP: 082283145835

Kata Kunci:

Implementasi

Nilai-Nilai Pancasila

Keywords:

Implementation Values

Pancasila

ABSTRAK

Nilai-nilai Pancasila haruslah diketahui, dipahami, dan diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, pada saat ini pengetahuan, pemahaman generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Permasalahan pemahaman ini mengakibatkan mulai ditinggalkan dan dilupakan Pancasila. Oleh sebab itu, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar sebelum keberhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

ABSTRACT

The values of Pancasila must be known, understood, and implemented by the Indonesian people in everyday life in order to realize the ideals of the proclamation of Indonesian independence. increasingly degraded and eroded by the invasion of new values that are not in accordance with national identity. This problem of understanding resulted in the abandonment and oblivion of Pancasila. Therefore, it is necessary to re-actualize the values of Pancasila so that they can be used as a reference for the Indonesian people in responding to various problems faced now and in the future, both problems that come from within and from outside. before our success in re-actualizing the values of Pancasila led to the alienation of Pancasila from the real life of the Indonesian nation.



PENDAHULUAN

Sulianti (2018:111) menyatakan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan, nilai-nilai Pancasila dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik itu sosial, spiritual, intelektual, dan profesional dalam bidang keilmuannya. Pendidikan adalah dasar ilmu yang harus dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan aturan yang sudah berlaku untuk setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran atau wajib belajar selama 12 tahun sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, pendidikan merupakan dasar yang penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia agar tidak buta akan hukum maupun ilmu yang berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Kehidupan bangsa Indonesia memerlukan adanya implementasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang mencerminkan kepribadian asli masyarakat bangsa Indonesia. Nilai, norma, dan etika yang selama ini terkandung dalam Pancasila benar-benar menjadi bagian yang sangat utuh dan bulat serta dapat menyatu dengan kepribadian setiap warga negara Indonesia sehingga dapat membentuk pola sikap, pola pikir, dan pola tindakan serta memberikan arah pada masyarakat bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan sebuah nilai karakter yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menata pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Peran Pancasila dalam Pendidikan tentulah sangat penting di Indonesia, karena Pancasila memiliki peran penting dalam pembentukan karakter melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara juga merupakan falsafah hidup bagi seluruh warga negara Indonesia karena nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila merupakan suatu hal yang mendasar bagi setiap kehidupan warga negara untuk dijadikan sebuah patokan atau pegangan dalam menjalin kehidupan sebagai warga negara yang baik atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan sebuah tolak ukur akan keberhasilan dari implementasi nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara nyata nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam proses pembelajaran karena penerapan nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada siswa mampu menguasai materi, namun yang terpenting adalah bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa sehingga anak didik memiliki karakter dan pola tingkah laku yang baik. Kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan: (1) Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran PKn menjadi PPKn yang mengemuka

dalam lima tahun terakhir, antara lain: (1) secara substansial, PKn terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), dan pengembangan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren). PPKn sebagai mata pelajaran memiliki misi dalam mengembangkan keadaban Pancasila yang diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggung jawab. Selain dengan penanaman nilai-nilai pancasila dalam proses pembelajaran, sebagai salah satu wujud penanaman nilai-nilai Pancasila yang diberikan kepada siswa melalui proses pembelajaran adalah dengan memberikan pemahaman dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Proses pembelajaran dianggap sebagai hal yang mendesak bagi anak didik dalam fungsinya untuk membimbing generasi muda untuk secara sukarela mengikatkan diri pada nilai-nilai dan norma moral yang berkarakter. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat agar masyarakat mematuhi dan menganut nilai-nilai dalam Pancasila karena nilai yang terkandung dalam pancasila mempunyai banyak makna untuk kehidupan sehari-hari dalam beragama, memberikan pendapat, dan lain-lain (Dewantara & Nurgiansah, 2021). Materi Pancasila dalam Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari PPKn untuk ruang lingkup Pancasila adalah:

1. Menghayati dan bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; menganalisis dan menerapkan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mensyukuri dan mendukung perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara; menganalisis dan mendemonstrasikan langkah-langkah untuk mewujudkan Pancasila sebagai Dasar Negara.
3. Menghayati dan menghargai nilai-nilai yang melekat dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Menganalisis dan menyaji nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun sayangnya, lembaga pendidikan saat ini kurang terlihat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila karena kurangnya filter atau pembatas masuknya globalisasi yang kini hampir seluruh masyarakat Indonesia menerapkannya. Sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata tanpa mempedulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari nilai-nilai makna yang terkandung dalam pancasila sangat berguna dan bermanfaat (Nurgiansah, 2020). Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk siswa sebagai warga negara yang Pancasila. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter dikemukakan oleh Samsuri (2011: 20) yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik warga negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar tidak sekedar membekali siswa ke jenjang selanjutnya tetapi penanaman moral yang diharapkan dapat membentuk warga negara yang baik. Sumiyati (2008: 1) menyatakan bahwa PKn sebagai pendidikan nilai, moral, dan norma tetap ditanamkan pada siswa sejak usia dini. Jika siswa sudah memiliki ketiga nilai moral tersebut, maka tujuan untuk membentuk sebuah warga negara yang baik akan mudah diwujudkan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dalam prakteknya PKn menghadapi kendala yang

mengakibatkan jauhnya tujuan pembelajaran. Pernyataan dari kelemahan PKn diungkapkan oleh Udin S. Winataputra (2009: 37) yang menyatakan bahwa proses pembelajaran dan penilaian lebih menekankan pada dampak instruksional yang terbatas pada penguasaan materi pada dimensi kognitif. Dengan demikian apa yang diperoleh peserta didik bukan bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik namun masih dalam lingkup kognitif. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa kelemahan mata pelajaran seperti Pendidikan Agama dan PKn lebih difokuskan pada masalah kognitif. Artinya berkaitan dengan pengetahuan siswa tentang mata pelajaran tersebut, namun kurangnya untuk memberikan pembekalan apa saja yang harus mereka lakukan ketika berhadapan dengan dunia nyata dan di mana mereka akan bertemu dengan semua orang yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti sejauh mana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran di sekolah dasar sebagai rumusan dalam penelitian ini.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, historis, dan konseptual. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Soemitro, 2010) dan dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara para murid dan guru. Data sekunder menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni: norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945 dan peraturan pemerintah. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Soekanto, 2003). Teknik pengumpulan data menggunakan literature research (Dewantara & Nurgiansah, 2021).

HASIL PEMBAHASAN

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara, harus sesuai dengan perundangundangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Nilai adalah ukuran, patokan, anggapan anggapan, dan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat mengenai sesuatu yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan (Nurgiansah, 2021). Menurut Nurgiansah (2021), fungsi nilai di antaranya yakni sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Nilai dapat menciptakan semangat pada manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang dalam masyarakat. Nilai dapat mendorong, menuntun, dan menekan seseorang untuk berbuat baik. Nilai dapat berfungsi

sebagai alat solidaritas di antara anggota masyarakat. Setiap bangsa harus memiliki konsepsi, ide, dan cita-cita luhur. Mengenai hakikat yang paling dalam dari negara serta hakikat yang paling mendalam dari hukum negara, konsepsi kenegaraan dan hukum setiap negara bangsa memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan latar sejarah, kondisi sosial budaya, serta karakteristik bangsa yang bersangkutan. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai bangsa negara adalah kebesaran, keluasan, dan kemajemukannya. Konsepsi tentang dasar negara dirumuskan dengan lima prinsip utama titik temu (yang mempersatukan keragaman bangsa), titik tumpu (yang mendasari ideologi, norma dan kebijakan negara), dan titik tuju (yang memberi orientasi kenegaraan, kebangsaan) bangsa Indonesia.

Kelima prinsip utama itu dikenal dengan sebutan pancasila. Kelima nilai dasar pancasila itu adalah:

1. Ketuhanan yang maha esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pembelajaran pada dasarnya adalah kemampuan yang diharapkan peserta didik setelah memperoleh pengalaman belajar. Tujuan mempunyai jenjang yang luas atau umum hingga kepada yang sempit atau khusus. Semua tujuan itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan pembelajaran harus berpusat pada perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan, karenanya harus dirumuskan secara operasional, dapat diukur, dan dapat diamati ketercapaiannya (Nana Sudjana dan Wari Suwariyah, 2010). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran melalui pendidikan sangat penting karena pendidikan nasional pada dasarnya berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Diharapkan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, maka akan membentuk manusia yang berpendidikan, berpengetahuan, dan berkarakter. Adapun konteks kehidupan global, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selain harus meneguhkan keadaban Pancasila juga harus membekali peserta didik untuk hidup dalam kancah global sebagai warga dunia (global citizenship). Hal ini dikarenakan warga negara tidak hanya hidup dalam lingkungan nasional tetapi juga hidup dengan bangsa lain dalam pergaulan Internasional. Selain itu, perlu disadari bahwa di dunia ini tidak hanya ada kita, akan tetapi ada orang lain yang bermukim di seluruh belahan dunia. Maka, kita harus banyak mempelajari tentang pendidikan warga global (Hakop Walangadi, Elmia Umar, Kian Palilati, 2020). Oleh karena itu, substansi dan pembelajaran Pancasila perlu diorientasikan untuk membekali warga negara Indonesia agar mampu hidup dan berkontribusi secara optimal pada dinamika kehidupan abad 21. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sekolah dasar selain mengembangkan nilai dan moral Pancasila, juga mengembangkan semua visi dan keterampilan abad 21 sebagaimana telah menjadi komitmen global.

Lebih dari itu sebagai landasan filosofis, empat konsensus kebangsaan telah menjiwai lahirnya Kurikulum 2013. Empat konsensus kebangsaan tersebut adalah: (1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup; (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Negara Kesatuan

Republik Indonesia, sebagai komitmen terhadap bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia; (4) dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud kesadaran atas keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012). Empat konsensus bernegara tersebut secara eksplisit juga diajarkan dalam struktur kurikulum mata pelajaran PPKn di setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA/ SMK). Artinya, setiap bab materi atau Kompetensi Dasar (KD) dan dalam Kompetensi Isi (KI) pada PPKn, harus memuat 4 konsensus bernegara secara eksplisit dalam pembelajaran. Tidak hanya memuat aspek pengetahuan (kognitif), tetapi juga mencakup aspek sikap dan keterampilan. Inilah yang membedakan secara tegas mata pelajaran PPKn dalam struktur Kurikulum 2013 dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam struktur Kurikulum 2006.

Pada gambar ini murid mampu memahami tentang pentingnya nilai pancasila yang mana terkandung di dalamnya menjelaskan akan makna di dalamnya

Gambar 1. proses mengajark nilai nilai pancasila



Makna Yang Terkandung Pada Nilai-nilai Dalam Pancasila

1. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa (Nilai Ketuhanan), yaitu:
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan “roh” sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa Bangsa Indonesia adalah Negara yang monotheisme percaya terhadap Tuhan yang satu bukan sebaliknya. Dengan kata lain, negara Indonesia berlandaskan agama. Pancasila dengan sila pertamanya, adalah sebuah falsafah yang sesuai dan bersahabat dengan agama. Oleh karenanya, sudah seharusnya sebagai Insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mendirikan perintahnya guna meningkatkan kesalehan kita.
2. Sila Kedua Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Dalam sila kedua mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Sila ini berlaku untuk diri sendiri, juga sesama manusia dan lingkungannya. Kemanusiaan yang dimaksud adalah manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang diwujudkan dalam semangat saling menghargai, toleran, yang dalam perilaku sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi, serta untuk kepentingan bersama.
3. Sila Ketiga Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah nilai persatuan. Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI, dimulailah komitmen bersama untuk terus membentengi keberagaman itu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Persatuan merupakan sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keragaman masyarakat. Bangsa Indonesia harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongannya.

Gambar 2. latihan mengerjakan soal



4. Sila Keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
Nilai yang terkandung Sila keempat pancasila adalah pedoman berdemokrasi Indonesia. Namun bagaimana cara mengimplementasikan demokrasi Indonesia masih dalam tahap pencarian identitas. Sejak merdeka, Indonesia telah melalui beberapa tahapan demokrasi, yaitu demokrasi masa revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi era orde baru dan demokrasi era reformasi. Bagaimana dasar demokrasi khas Indonesia, dikemukakan oleh Soekarno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945.
5. Sila Ke Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didalamnya terkandung makna bahwa keadilan sosial atau pemerataan bersama bagi seluruh komponen rakyat Indonesia bukan keadilan bagi golongan/ pemerintah/penguasa. Penerapan sikap siswa pada sila kelima ini adalah dengan bersikap adil pada tempatnya, tidak membenarkan yang salah, tidak menyukai hanya karena sama. Selain itu siswa juga bisa bersikap adil kepada siapapun jika memang dengan situasi yang benar. Sama melihat yang kaya dan miskin, sama dalam berteman, itulah sikap-sikap yang seharusnya diterapkan siswa di sekolah khususnya dan juga pada lingkungan masyarakat pada umumnya.

KESIMPULAN

Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang

berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya sebatas mengetahui saja namun melaksanakannya dalam kehidupan. Dan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaroini, Ambiro Puji, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi', *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.2 (2016), 440
- Wahyono, Imron, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kegiatan Pembelajaran Di Sdn 1 Sekarsuli the Implementation of Pancasila ' S Values in Learning Activities in Sdn 1', 2018
- Julya Marlita Khaerunisa, S., Anggraeni Dewi, D., & Furi Furnamasari, Y. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Anak Sekolah Dasar. *Action Research Literate*, 4(1), 21â€“23. <https://doi.org/10.46799/ar.v4i1.4>
- Kartini, D., & Dewi, D. (2021). Implementasi Pancasila dalam Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 113â€“118. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/1304>
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muzayin. 1992. *Ideologi Pancasila (Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja)*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Oetama , Jakob, dkk. *Rindu Pancasila*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Oksep Adhayanto, *Rekonstruksi Nilai-Nilai Masyarakat Lokal dalam Semangat Otonomi Daerah Menuju Penguatan Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Perbatasan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014.
- Abidin, Y. (2012). *Model penilaian otentik dalam pembelajaran membaca pemahaman beroreintasi pendidikan karakter*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Budiningsih, A. (2014). *Pembelajaran moral: Berpijak pada karakter siswa dan budayanya*. Rineka Cipta.
- Dianti, P. (2014). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter siswa. *JPIS*, 23(1), 58– 68.